

# MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011



*Millenium Development Goals* (MDG's) atau Tujuan Pembangunan Millenium adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan, yaitu: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; (7) kelestarian lingkungan hidup; (8) membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia memiliki dan ikut melaksanakan komitmen tersebut dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga ikut serta mendukung komitmen pemerintah tersebut, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target MDG's.

Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2010 dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan. Pemerintah memandang bahwa pencapaian tujuan MDGs

sampai dengan tahun 2010 belum optimal. Percepatan pencapaian MDGs di tingkat nasional tertuang dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia. Sementara itu di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Provinsi Kalimantan Timur disusun sesuai panduan yang

diterbitkan oleh Bappenas, terdiri dari empat bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, mendeskripsikan gambaran kondisi pencapaian MDGs di Kalimantan Timur dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi; Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan RAD MDGs Kalimantan Timur 3 Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium, mendeskripsikan tentang arah kebijakan dan strategi percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium masing-masing tujuan di Kalimantan Timur; Bab III Monitoring dan Evaluasi, menggambarkan tentang mekanisme monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian tujuan



1. Menanggulangi Kemiskinan & Kelaparan
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
3. Mendorong Kesetaraan Gender & Pembdy Perempuan
4. Menurunkan Angka Kematian Anak
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya
7. Memastikan kelestarian LH
8. Mengembangkan kemitraan global dlm pembangunan

pembangunan millenium di Provinsi Kalimantan Timur; dan Bab IV Penutup.

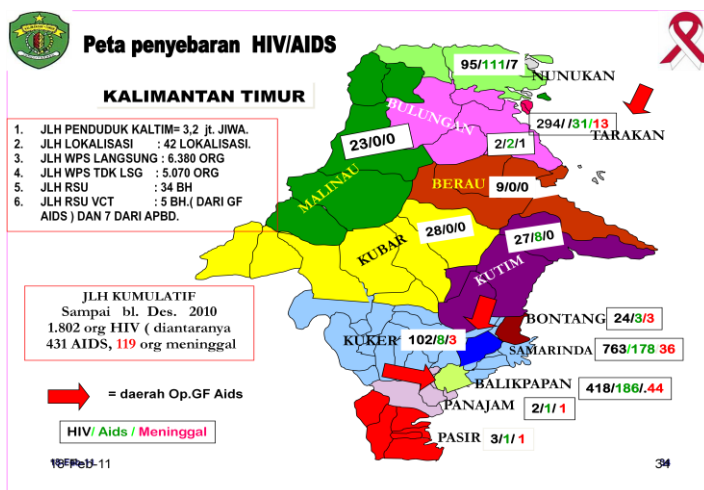
Dalam penyusunan RAD Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Provinsi Kalimantan Timur ini tidak seluruh tujuan (8 tujuan) MDGs dibahas, namun hanya 7 tujuan, mengingat tujuan ke-8 yaitu Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan, kurang relevan untuk dibahas di tingkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan menjadi kompetensi Pemerintah Pusat

Untuk percepatan pencapaian maka dibuatlah mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat target capaian dari pelaksanaan RAD MDGs untk masing-masing tujuan (*goal*). Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD MDGs

menggambarkan tanggung jawab masing-masing SKPD sesuai tujuan MDG-nya, waktu pelaksanaan, dan langkah tindak lanjut.

### 3.1. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (stakeholders). Pemantauan dan Evaluasi oleh lembaga pemerintah dilakukan secara internal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta mengukur dampak kebijakan dan program pencapaian Target MDGs.



Kegiatan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Kalimantan Timur juga bisa dilakukan secara independen oleh lembaga-lembaga Non Pemerintah seperti LSM ataupun Perguruan Tinggi. Hasil Pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh sekretariat Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 – 2015 dengan empat Pokja agar dihasilkan laporan pemantauan dan evaluasi yang sistematis. Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD MDGs dilakukan oleh Kepala Bappeda.

Disamping prinsip-prinsip tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, yaitu :

1. Pelaku pemantauan dan evaluasi adalah semua pelaku/stakeholders yang berkepentingan terhadap pencapaian target MDGs lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kata lain, pelaku pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan dan program Pencapaian target MDGs di Provinsi Kalimantan Timur adalah pemantau bagi dirinya sendiri dan bagi pelaku lain. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Tim Pengarah Pencapaian Target MDGs di tingkat Provinsi bertanggung jawab mengkoordinasikan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder/SKPD.

2. Obyek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang terkait dengan upaya pencapaian Target MDGs di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan dilaksanakan sejak awal dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program terkait, dan dilakukan oleh seluruh stakeholder di Provinsi Kalimantan Timur.

3. Sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program percepatan pencapaian target MDGs adalah segenap sarana yang dimiliki oleh masing-masing pelaku, selaras dengan semangat kerelawanan dan keikutsertaan, sehingga para pelaku dapat mempergunakan metode dan alat mereka sendiri untuk dikompilasikan hasilnya dan dikaji bersama sebagai dasar perbaikan dan program percepatan pencapaian target MDGs selanjutnya.

4. Metode pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program pencapaian target MDGs ditentukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-masing dengan semangat memperbaiki kebijakan dan program percepatan pencapaian target MDGs yang sedang berjalan.

### 3.2. Tujuan/Kegunaan Pemantauan dan Evaluasi

Tujuan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Pencapaian

Target MDGs adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk selanjutnya dapat diambil langkah-langkah guna meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki.

Kegunaan utama pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian MDGs antara lain:

1. Kegunaan terkait dengan operasional yaitu :
  - a. Melalui pemantauan dan evaluasi kita dapat mengetahui cara yang tepat untuk mencapai target MDGs yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program percepatan pencapaian target MDGs yang dilakukan.
  - b. Melalui pemantauan dan evaluasi kita dapat lakukan perubahan-perubahan modifikasi dan supervisi terhadap kegiatan/program percepatan pencapaian target MDGs yang dilaksanakan, dan
  - c. Melalui pemantauan dan evaluasi, akan dapat dikembangkan tujuan-tujuan serta analisis informasi yang bermanfaat bagi pelaporan kegiatan.
2. Kegunaan terkait dengan kebijakan yang mencakup :
  - a. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat dirumuskan kembali, strategi percepatan pencapaian target MDGs, pendekatan, serta asumsi-asumsi yang digunakan.
  - b. Untuk menggali dan meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang hubungan antar kegiatan program pembangunan, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan di masa-masa mendatang.

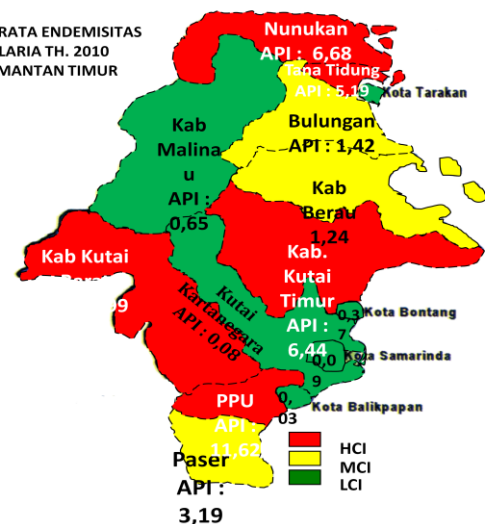
### 3.3. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan tahap pelaksanaan dan akhir suatu program dan kegiatan, untuk menilai apakah sebuah kebijakan dan program dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

Secara umum, kegiatan pemantauan dan evaluasi akan menjawab pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang direncanakan?
- b. Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan berhasil? Jika berhasil faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya? Dan apabila tidak berhasil, hal-hal apa saja yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut, mengapa?
- c. Apakah kita akan mengulangnya lagi dengan berbagai perbaikan atau melakukan hal yang berbeda?

PETA STRATA ENDEMISITAS  
MALARIA TH. 2010  
KALIMANTAN TIMUR



Secara garis besar, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi meliputi :

- a. Menilai kemajuan pelaksanaan program percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium.
- b. Mengetahui kendala-kendala dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program.

- c. Mengukur keluaran / hasil, manfaat / maksud dan atau dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
- d. Sebagai umpan balik untuk peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur untuk periode sekarang maupun yang akan datang.

### 3.4. Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan Pemantauan evaluasi percepatan pencapaian target-target MDGs ini dapat dibagi menurut waktu pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemantauan pada saat program berjalan, kegiatan ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Evaluasi tahunan, dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target-target tahunan yang telah disusun.
3. Evaluasi akhir (summative evaluation), dilakukan pada akhir periode rencana aksi ini yaitu tahun 2015.

Dengan demikian kegiatan pemantauan dan evaluasi bukan merupakan kegiatan yang sekali saja dilakukan pada saat akhir program/kegiatan tetapi kegiatan yang bisa dilakukan sesuai tahapan yang dilaksanakan.

Dalam mendukung tercapainya target-target MDGs di tingkat Nasional, Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun **Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Millenium (MDGs)** sebagai salah satu bentuk komitmen **Pembangunan Millenium di Indonesia** yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2010.

RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs ini menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang disepakati secara global dalam target-target MDGs. Oleh karena itu RAD MDGs ini

perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJM-D dan Renstra SKPD maupun dalam jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun dalam Renja SKPD.

Dukungan pendanaan Pemerintah Daerah dalam APBD, sangat penting dalam mencapai keberhasilan RAD Percepatan Pencapaian MDGs termasuk pendanaan partisipasi swasta dan masyarakat. Disamping itu, dukungan komitmen dari DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi *budgeting* dalam penentuan anggaran pembangunan daerah juga sangat penting artinya untuk menjamin keberhasilan implementasi RAD ini.

Untuk menjamin implementasi RAD dan mencapai target seperti yang diharapkan dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia perlu direspon oleh Pemerintah Daerah. Dan selain partisipasi dalam pendanaan guna mendukung tercapainya target-target MDGs, peran masyarakat dalam hal ini LSM, Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat yang lainnya, juga diperlukan untuk ikut melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program percepatan pencapaian target MDGs, tentu saja sesuai dengan koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.



**PEMETAAN CAPAIAN TARGET MDGs PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2011**

No	Goal	Target	Indikator	Capaian		
				Achieve	Ontrack	Offtrack
1.	<b>Tujuan 1 . Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan</b>	3	10	1	6	1
2.	<b>Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua</b>	1	3	-	3	-
3.	<b>Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	1	7	4	3	-
4.	<b>Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian anak</b>	1	4	2	2	-
5.	<b>Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu</b>	2	7	1	6	-
6.	<b>Tujuan 6 : Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya</b>	3	11	1	4	5
7.	<b>Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup</b>	3	16	2	8	4
	<b>TOTAL = 7</b>	14	58	11	34	10